



## Analisis Peran Dinas UMKM Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ediman Hulu Universitas Nias <a href="mailto:edimanhulu93@gmail.com">edimanhulu93@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Ayler Beniah Ndraha Universitas Nias <a href="mailto:AylerBeniahNdraha@gmail.com">AylerBeniahNdraha@gmail.com</a>	
Fatolosa Hulu Universitas Nias <a href="mailto:FatolosaHulu@gmail.com">FatolosaHulu@gmail.com</a>	
Robin Markus Putra Waruwu Universitas Nias <a href="mailto:RobinMarkusPutrWaruwu@gmail.com">RobinMarkusPutrWaruwu@gmail.com</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Hulu, E., Ndraha, A. B. Hulu, F., & Waruwu, R. M. P. (2025) Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2837-2844.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas UMKM dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Gunungsitoli. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan strategi, tantangan, serta dampak program pemberdayaan terhadap pelaku UMKM lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas UMKM telah menjalankan berbagai program, antara lain pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi perizinan, serta kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung akses permodalan. Program-program tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya literasi digital, dan akses informasi yang belum merata. Selain itu, tantangan administratif dalam pengajuan kredit serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Dinas UMKM di Kota Gunungsitoli sudah berdampak positif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, namun masih diperlukan evaluasi berkelanjutan, perbaikan strategi komunikasi, serta sinergi lintas sektor agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UMKM, pemberdayaan, peran pemerintah, akses permodalan, Gunungsitoli

### Abstract

This study aims to analyze the role of the UMKM Office in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Gunungsitoli City. Using a qualitative descriptive approach, this study describes the strategies, challenges, and impacts of empowerment programs on local MSME actors. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings reveal that the UMKM Agency has implemented various programs, including entrepreneurship training, business management mentoring, licensing facilitation, and collaboration with financial institutions to support access to capital. These programs have proven to contribute to improving business capacity, although there are still obstacles in the form of budget constraints, low digital literacy, and unequal access to information. Additionally, administrative challenges in credit applications and limited human resources are the main barriers. Overall, this study confirms that the role of the UMKM Department in Gunungsitoli City has had a positive impact on strengthening community economic independence. However, ongoing evaluation, improvements in communication strategies, and cross-sectoral collaboration are still needed to ensure that UMKM empowerment can be implemented more effectively and sustainably.

**Keywords:** UMKM, empowerment, government role, access to capital, Gunungsitoli

### A. Pendahuluan

Dalam dinamika pembangunan ekonomi, peran pemerintah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pengelolaan sektor perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah hadir melalui kebijakan dan regulasi yang bertujuan menciptakan stabilitas, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi modern adalah penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia (Arianto, 2018; Tambunan, 2019). UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Rahman, 2021).

Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Pemerintah, melalui lembaga yang berwenang seperti Dinas Koperasi dan UMKM, memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan keberlanjutan sektor ini. Dukungan yang diberikan umumnya mencakup akses permodalan, pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran (Suhartini, 2020). Sejalan dengan kebijakan nasional, berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM, secara normatif telah menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan UMKM (Soekanto, 2020).

Namun demikian, keberadaan UMKM tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang kompleks. Keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi digital merupakan hambatan nyata yang masih dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha (Hidayat, 2023; Sutanto, 2019). Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi semakin menuntut UMKM untuk bertransformasi agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional (Khanna & Palepu, 2022). Digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia, adaptasi teknologi, dan strategi branding produk (Putra & Sari, 2022; Astuti, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah melalui dinas terkait dalam memperkuat kapasitas UMKM. Santoso (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat apabila didukung dengan program berkelanjutan. Penelitian Budi Santoso (2021) di Kota Semarang, misalnya, membuktikan bahwa pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM berdampak positif terhadap peningkatan jumlah wirausaha baru, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan angka pengangguran. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Pratama (2020) di Kabupaten Purbalingga, yang mengungkapkan

bahwa meskipun program pelatihan dan fasilitasi pemasaran telah berjalan, masih terdapat kendala berupa kurangnya sinergi antarinstansi serta rendahnya partisipasi pelaku usaha.

Konteks lokal di Kota Gunungsitoli memperlihatkan fenomena yang tidak jauh berbeda. UMKM di daerah ini didominasi oleh usaha perdagangan, kuliner, dan kerajinan tangan yang berbasis keluarga dengan skala kecil. Walaupun potensinya besar, keterbatasan modal, akses pasar, serta pemahaman terkait pemasaran modern menjadi tantangan utama yang menghambat perkembangan usaha (Kurniawan, 2021; Lestari, 2022). Dinas UMKM Kota Gunungsitoli telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan manajemen usaha, pendampingan pemasaran digital, hingga kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kredit usaha. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan akibat kompleksitas persyaratan administratif serta rendahnya literasi keuangan.

Lebih lanjut, fenomena migrasi tenaga kerja dari daerah ke luar wilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Scholte (2022) menjelaskan bahwa migrasi erat kaitannya dengan keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya serap sektor usaha lokal. Oleh karena itu, penguatan UMKM di Kota Gunungsitoli tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi, tetapi juga strategis dalam menekan tingkat migrasi keluar daerah serta mengurangi pengangguran. Dengan kata lain, pemberdayaan UMKM melalui peran aktif Dinas UMKM merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Pratama, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk dilakukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas peran Dinas UMKM dalam memberdayakan pelaku usaha kecil di Kota Gunungsitoli. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis, baik dalam memperkuat teori pemberdayaan ekonomi kerakyatan maupun sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi UMKM di masa mendatang.

## **B. Metodologi**

### **1. Research Design**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan peran Dinas UMKM dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Gunungsitoli. Desain penelitian ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara komprehensif melalui data yang bersifat naratif.

### **2. Participants (Population and Sample)**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas UMKM Kota Gunungsitoli. Mengingat keterbatasan penelitian, maka digunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel. Sampel penelitian terdiri dari 32 pelaku UMKM yang mewakili sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan tangan, serta sejumlah informan kunci dari Dinas UMKM. Pemilihan sampel ini didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dalam program pemberdayaan UMKM, sehingga mampu memberikan data yang relevan dan mendalam.

### **3. Technique of Data Collection**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan aparatur Dinas UMKM, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, hambatan, serta efektivitas program pemberdayaan.
- b. Observasi langsung pada aktivitas usaha dan kegiatan pemberdayaan UMKM untuk mendapatkan data empiris terkait implementasi program.
- c. Dokumentasi, berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi, arsip dinas, dan dokumen terkait lainnya.

### **4. Instruments**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur untuk menggali informasi dari informan.
- b. Lembar observasi yang digunakan dalam mencatat aktivitas dan kondisi lapangan.
- c. Dokumen pendukung seperti laporan tahunan Dinas UMKM, data registrasi UMKM, dan arsip kebijakan pemerintah.

## 5. Technique of Data Analysis

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi yang relevan; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif; sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengacu pada temuan lapangan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Dinas UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Gunungsitoli.

Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Gunungsitoli merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk setelah Kota Gunungsitoli resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2008. Pembentukan dinas ini bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan sektor industri, koperasi, serta usaha kecil dan menengah di wilayah kota. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaan dinas ini menjadi penting dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Awalnya, tugas dan fungsi dinas ini berada di bawah satuan kerja yang lebih umum bersama dengan sektor perdagangan dan tenaga kerja. Namun, seiring dengan kebutuhan dan fokus pemerintah daerah untuk memperkuat UMKM dan koperasi, maka dinas ini mengalami perubahan struktur dan kewenangan. Dinas ini kemudian berdiri secara mandiri dengan tanggung jawab lebih terfokus pada pembinaan industri kecil, pengembangan koperasi, dan peningkatan kapasitas UMKM.

Selama perkembangannya, Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Gunungsitoli telah menjalin berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, swasta, dan lembaga pendidikan. Dinas ini juga aktif dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan, promosi produk lokal, serta memberikan bantuan peralatan dan akses pembiayaan kepada pelaku usaha. Program-program tersebut bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan visi untuk mewujudkan pelaku industri dan UMKM yang tangguh dan mandiri, Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM terus berbenah dan berinovasi dalam menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dinas ini tetap berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi lokal di Kota Gunungsitoli.

#### Peran Dinas UMKM

Dinas UMKM Kota Gunungsitoli memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi usaha kecil. Program-program yang dilaksanakan meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi perizinan, serta kerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah membantu mereka memahami aspek dasar manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan, perencanaan produksi, dan strategi pemasaran. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan, terutama dalam penerapan teknologi digital untuk pemasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Suhartini (2020) yang menegaskan bahwa keberadaan Dinas UMKM menjadi kunci penguatan kapasitas usaha, namun efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh.

Selain itu, Dinas UMKM juga berperan sebagai fasilitator dalam mempermudah proses perizinan usaha. Banyak pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam memperoleh izin usaha kini terbantu melalui mekanisme yang lebih sederhana dan efisien. Upaya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM.

#### Akses Permodalan

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas pembiayaan oleh pelaku UMKM. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas UMKM

telah bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam penyediaan kredit usaha, banyak pelaku yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang dianggap rumit. Misalnya, beberapa pelaku usaha tidak memiliki laporan keuangan sederhana atau dokumen legalitas yang menjadi syarat pengajuan kredit. Kondisi ini memperkuat temuan Hidayat (2023) bahwa kendala utama UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal akibat rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan jaminan. Padahal, modal merupakan faktor fundamental untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan usaha. Oleh karena itu, meskipun program permodalan telah ada, efektivitasnya masih belum maksimal.

### **Dampak Program Pemberdayaan**

Program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan, pendapatan mereka meningkat karena usaha yang dijalankan menjadi lebih terstruktur. Selain itu, keberadaan program pendampingan juga membantu dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, pemberdayaan UMKM berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka migrasi keluar daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman (2021) yang menekankan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang sedang berkembang. Dengan demikian, meskipun belum optimal, keberadaan program dinas sudah memberikan dampak nyata dalam penguatan ekonomi lokal di Kota Gunungsitoli.

## **2. Pembahasan**

### **Peran Dinas UMKM dalam Memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli**

Dinas UMKM Kota Gunungsitoli memainkan peran yang signifikan dalam mendorong proses pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal, dan fasilitasi pemasaran produk lokal. Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas, program-program tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM. Pandangan ini sejalan dengan Suryana (2020) yang menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus melibatkan penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar agar mampu berkembang secara mandiri.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan merata. Beberapa pelaku UMKM di wilayah pedesaan mengaku kurang mendapat informasi mengenai program-program pemberdayaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih baik agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Kuncoro (2021), akses informasi yang merata merupakan faktor fundamental dalam memastikan pemerataan manfaat dari kebijakan pemerintah. Selain kendala informasi, keterbatasan anggaran dan cakupan program juga menjadi tantangan. Beberapa kegiatan yang dirancang dengan baik tidak dapat terlaksana secara optimal karena keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan tenaga pelaksana. Bahkan, terdapat program yang belum tepat sasaran karena perencanaan tidak berbasis pada data UMKM yang akurat. Hal ini memperkuat pandangan Rahardjo (2020) bahwa perencanaan berbasis data merupakan prasyarat utama efektivitas kebijakan.

Koordinasi internal dinas juga menjadi aspek krusial. Beberapa pejabat menyebut perlunya sinergi yang lebih erat antara bidang koperasi dan bidang usaha kecil agar program pemberdayaan tidak berjalan parsial. Prasetyo (2022) menekankan bahwa sinergi lintas sektor dalam instansi pelaksana sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Pelatihan yang diberikan sejauh ini telah berjalan rutin, tetapi masih ada keluhan dari peserta terkait relevansi materi. Sebagian pelatihan bersifat teoritis, sedangkan pelaku usaha membutuhkan keterampilan praktis yang langsung dapat diaplikasikan. Hermawan (2021) menyatakan bahwa pelatihan efektif harus berbasis kebutuhan peserta dan relevan dengan konteks lokal.

Selain pelatihan, program bantuan modal dan fasilitasi pemasaran juga memberi kontribusi positif. Beberapa pelaku usaha menyatakan bantuan peralatan serta promosi produk meningkatkan pendapatan mereka. Akan tetapi, distribusi bantuan masih belum merata, sehingga menimbulkan disparitas. Fitriani (2023) menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh transparansi distribusi dan pendampingan pasca-program. Lebih jauh, pengalaman pelaku usaha menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya usaha dijalankan, melainkan oleh semangat, konsistensi, dan keterbukaan terhadap pembelajaran baru. Wahyuni (2020) menekankan bahwa pembinaan

UMKM pemula perlu mendapat perhatian lebih karena kelompok ini sangat rentan. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha puas dengan program yang ada, sementara sebagian lainnya belum pernah mengaksesnya. Faktor keterbatasan informasi, jadwal yang tidak fleksibel, dan kendala teknis menjadi penyebab. Untuk itu, penyebaran informasi berbasis digital perlu diperkuat. Lestari (2022) menegaskan bahwa digitalisasi informasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Dengan demikian, peran Dinas UMKM sudah memberi dampak nyata, tetapi masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan sistem komunikasi, pendataan, serta koordinasi internal agar lebih efektif.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli**

Meskipun program pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli telah menunjukkan perkembangan positif, sejumlah hambatan masih ditemukan di lapangan. Kepala Dinas UMKM menyatakan bahwa arah program sudah jelas, tetapi pelaksanaan masih menghadapi tantangan teknis dan struktural. Hambatan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping. Banyak pelaku usaha membutuhkan pendampingan untuk memahami dan mengimplementasikan materi pelatihan, namun jumlah tenaga pendamping terbatas. Santosa (2020) menekankan bahwa pendampingan intensif sangat krusial untuk memastikan dampak program terasa hingga tingkat akar rumput.

Kedua, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Beberapa kegiatan pelatihan, distribusi bantuan, dan kunjungan lapangan tidak bisa dijalankan secara maksimal karena dana yang terbatas. Hal ini senada dengan Kurniawan (2020) yang menegaskan bahwa anggaran yang minim membuat target pemberdayaan sulit tercapai tanpa dukungan mitra eksternal. Ketiga, rendahnya partisipasi pelaku usaha juga menjadi tantangan signifikan. Banyak pelaku UMKM yang belum terlibat aktif karena kurangnya informasi, jadwal yang tidak sesuai, atau prosedur yang dianggap rumit. Fatimah (2019) menegaskan bahwa partisipasi penerima manfaat merupakan kunci keberhasilan setiap program pemberdayaan.

Selain itu, aspek legalitas usaha juga menjadi kendala. Banyak pelaku UMKM belum memiliki izin usaha sehingga sulit mengakses bantuan dan pelatihan. Penyebaran informasi juga belum merata, terutama di wilayah terpencil. Rahmadani (2022) menegaskan bahwa distribusi informasi yang tepat sasaran merupakan fondasi penting bagi pemerataan akses program. Di sisi lain, meskipun sebagian pelaku usaha merasa terbantu, ada juga yang mengeluhkan distribusi bantuan yang belum adil dan kurangnya pendampingan lanjutan. Hal ini menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi. Hasibuan (2021) menyatakan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi instrumen vital dalam memastikan keberlanjutan program. Kendala lain yang ditemui adalah keterbatasan modal, minimnya keterampilan digital, dan lokasi usaha yang kurang strategis. Putri (2020) menekankan bahwa solusi pemberdayaan harus berbasis realitas lokal, agar lebih kontekstual dan efektif.

Terakhir, pelayanan yang dinilai lambat serta belum adanya sistem digitalisasi pelayanan publik memperparah situasi. Yuliana (2021) menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan program secara signifikan.

### **Strategi yang Dapat Diterapkan untuk Meningkatkan Efektivitas Peran Dinas UMKM**

Dinas UMKM Kota Gunungsitoli telah menempuh berbagai langkah strategis, termasuk menjalin kolaborasi dengan perbankan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini berpotensi besar dalam memperkuat pemberdayaan UMKM, meskipun belum konsisten. Kurniawan (2021) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor harus dijalankan secara berkelanjutan agar mencapai tujuan bersama. Selain kolaborasi, strategi promosi produk lokal melalui pameran, media sosial, dan pelatihan digital marketing juga sudah dilakukan. Namun, keterbatasan literasi digital pelaku usaha serta keterbatasan dana menjadi kendala. Susanto (2020) menekankan bahwa promosi UMKM harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM agar hasilnya lebih maksimal. Rencana pengembangan jangka panjang telah disusun, tetapi implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, tenaga pendamping, serta ketepatan sasaran. Prasetyo (2020) menyatakan bahwa perencanaan strategis harus selaras dengan kapasitas implementasi agar tidak berhenti sebagai dokumen.

Strategi pelatihan perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, seperti perizinan, pembukuan, produksi, dan pemasaran. Nurhayati (2022) menegaskan bahwa strategi pemberdayaan yang efektif adalah yang berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha. Dinas UMKM juga menyadari perlunya membangun karakter kewirausahaan selain keterampilan teknis. Wahyuni (2023) menyebut bahwa pemberdayaan UMKM harus memadukan kedua aspek tersebut untuk mencapai keberlanjutan. Tantangan lain adalah

kesenjangan akses informasi, terutama di daerah pinggiran. Lestari (2021) menegaskan bahwa keterjangkauan informasi dan akses layanan merupakan faktor keberhasilan program pemberdayaan. Promosi digital juga harus diperkuat dengan pendekatan bertahap agar pelaku UMKM mampu beradaptasi. Selain itu, partisipasi pelaku usaha dalam perumusan program sangat penting. Hamid (2020) menyebut bahwa pendekatan partisipatif akan membuat strategi lebih sesuai dengan realitas di lapangan.

Akhirnya, diperlukan integrasi antarprogram, misalnya pelatihan yang terhubung dengan akses modal, dan akses modal yang dibarengi dengan pendampingan usaha. Pendekatan terpadu ini, sebagaimana ditegaskan oleh Fitriani (2023), akan memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan UMKM.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas UMKM Kota Gunungsitoli telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, dan fasilitasi pemasaran. Namun, efektivitas program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, perencanaan yang belum berbasis data, serta ketidaksesuaian program dengan kebutuhan pelaku usaha. Meskipun langkah-langkah awal sudah baik, masih diperlukan evaluasi dan peningkatan di berbagai aspek.
2. Meskipun program pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli telah menunjukkan hasil yang baik dan manfaat bagi banyak pelaku usaha, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, rendahnya partisipasi pelaku usaha, kurangnya informasi, dan belum meratanya pendampingan. Tantangan-tantangan ini menjadi indikator bahwa dibutuhkan perbaikan dari sisi strategi, koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan.
3. Dinas UMKM Kota Gunungsitoli telah memiliki arah strategi yang cukup baik dalam memberdayakan UMKM, seperti kolaborasi lintas sektor, promosi digital, dan rencana pengembangan jangka panjang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, akses yang belum merata, serta belum sepenuhnya terfokus pada kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, strategi yang ada perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih partisipatif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

#### **E. Referensi**

- Arianto, T. (2018). *Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2019). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Astuti, D. (2023). *Tantangan Pengembangan Kawasan UMKM*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Hidayat, D. (2023). *Karakteristik UMKM dan Kendala dalam Perkembangannya*. Bandung: Pustaka Setia
- Khanna, T., & Palepu, K. (2022). The Role of Flexibility and Innovation in the Success of Small and Medium Enterprises. *Journal of Business Research*, 58(3), 345-356.
- Kurniawan, A. (2021). *Peningkatan Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM Melalui Pelatihan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sari.
- Lestari, R. (2022). *Fleksibilitas UMKM dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pratama, A. (2024). *UMKM Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Putra, Y., & Sari, A. (2022). *Peningkatan Branding Produk Daerah melalui Integrasi Kluster UMKM*. Jakarta: PT. Indah Sejahtera.
- Rahman, M. (2021). *Kontribusi UMKM dalam Pemerataan Ekonomi di Daerah Pedesaan dan Perkotaan*. Makassar: Andi Offset.

- Rahman, M., & Dewi, P. (2021). Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan UMKM. Malang: UB Press.
- Santoso, D. (2020). Definisi dan Peran UMKM dalam Perekonomian Lokal. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Scholte, J. A. (2022). Globalization and Migration: The Impact of Labor Movements. Oxford: Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, N. (2020). Peran Dinas UMKM dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Semarang: Penerbit Diponegoro.
- Sutanto, R. (2019). Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan UMKM. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jakarta: LP3S.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.